

Analisis status hukum pemegang saham yang melakukan penyeteroran modal secara mengangsur dalam perseroan terbatas (studi kasus putusan Nomor 312/PDT.G/2010/PN.PST JKY. PST = Analysis of the legal status of shareholders to deposit shares in installments in the company limited case studies of court decisions number 312 pdt g 2010 pn jkt pst / Revi Laracaka

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20387950&lokasi=lokal>

---

Abstrak

[Skripsi ini membahas ketentuan penyeteroran modal, status hukum pemegang saham yang melakukan penyeteroran modal dengan cara mengangsur serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT Putri Mea padahal penyeteroran modal dilakukan dengan cara mengangsur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPT ketentuan penyeteroran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak dimungkinkan untuk diangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham yang melakukan penyeteroran saham secara mengangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham yang sah PT. Putri Mea adalah pertimbangan yang tidak tepat. Agar permasalahan demikian tidak terjadi di kemudian hari, hendaknya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki ketentuan dalam UUPT dengan cara menyatakan bahwa direksi yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran ketentuan penyeteroran modal., The focus of this thesis are the regulation of capital Deposit, the legal status of shareholders pays unpaidfull capital, and analyzing the consideration of the judge who declared the plaintiff as the legitimate shareholders of PT Putri Mea whereas pays unpaidfull capital. The results of this case study indicate that the capital deposit is made in full and shall not be paid in installments/unpaidfull, the shareholders to deposit shares in installments can not be regarded as legitimate shareholders, and consideration judge stating that the plaintiff as the legitimate shareholders of PT. Putri Mea is improper consideration. At the end of the thesis, authors also suggested that States needs to rearrange the regulation about company limited with regulated that the board of Director will be responsibility of shares deposit regulation fallacy]